



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Jenis : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : PT. JAMSOSTEK (Persero)
Sifat : **Terbuka**
Hari, tanggal : Kamis, 11 Pebruari 2010
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Ketua Rapat : Dr. Sumarjati Aryoso, SKM /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara : Membicarakan pengelolaan dana investasi jamsostek
Jumlah kehadiran : 32 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang izin

I. **PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Jamsostek dibuka pukul 09.20 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1) rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. **POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Dirut PT. Jamsostek (Persero) menyampaikan paparan sebagai berikut :
 - A. Fortopolio Investasi PT. Jamsostek (Persero) 2007-2009 (Konsolidasi)

Instrumen	2007		2008		2009	
	Dana	Hasil	Dana	Hasil	Dana	Hasil
Deposito	20.245.789	2.237.214	20.523.384	1.682.896	27.259.342	2.839.462
Obligasi	25.387.431	2.740.320	29.897.641	3.840.476	35.868.832	4.395.937
Saham	11.995.337	1.142.802	8.845.512	1.542.611	14.044.083	1.593.797
Reksadana	1.883.537	360.254	1.947.417	103.708	3.014.111	119.463
Penyertaan	32.254	80	32.254	160	26.670	4.762
Properti	526.694	68.770	509.850	74.756	487.239	74.540
Total	60.071.041	6.549.440	61.756.058	7.244.607	80.700.277	9.027.961

B. Pencapaian Anggaran

Uraian	2007			2008			2009		
	RKAP	Realisasi	%	RKAP	Realisasi	%	RKAP	Realisasi	%
Total Dana	54.217.197	60.071.041	110,80	68.419.992	61.756.058	90,26	72.744.348	80.700.277	110,94
Total Hasil	5.382.202	6.549.440	121,69	6.061.540	7.244.607	119,52	6.848.829	9.027.961	131,82
Yield	10,80%	12,25%	113,43	9,54%	11,97%	125,47	10,36%	12,72%	122,78

C. Deposito

Kategori Bank	2007	2008	2009
Bank Pemerintah	54,47 %	52,87 %	49,94 %
BPD	26,27 %	24,53 %	28,30 %
Bank Swasta Nasional	22,17 %	22,78 %	21,75 %

D. Obligasi

Yang terbesar yaitu Surat Utang Negara pada tahun 2009 sejumlah 70,72% dan terkecil Pertambangan sejumlah 0,30%.

E. Saham

Komposisi Tahun 2009 antara lain infrastruktur, utilitas dan transportasi (27,43%), Keuangan (27,39%) Pertambangan (19,19%), Aneka industri (6,52%), perdagangan jasa dan investasi (6,04%), Industri dasar dan Kimia (5,74%), Pertanian (4,70%) dan Industri barang dan konsumsi (2,99%).

F. Reksadana

Terdiri atas RD Pendapatan tetap, RD Saham, RD Campuran, RD Indeks dan ETF.

G. Property

Terdiri atas Tanah (44%), Menara Jamsostek (55%) dan Graha Nagoya Mas Batam (1%).

H. Pernyertaan

Terdiri atas PT. Bijak (Anak Perusahaan), Bank Syariah Bukopin (PT.PBI), PT. Asrinda Arthasangga, PT. Marga Mandala Sakti dan PT. Bank Muallat

I. RKAP dana dan hasil tahun 2010

Portofolio Investasi	Tahun 2010		% Alokasi		YOI
	Dana	Hasil	Dana	Hasil	
Deposito	23.337.641	1.828.844	26,38%	21,44%	7,77%
Obligasi	40.888.522	4.234.965	46,21%	49,64%	10,98%
Saham	17.656.391	2.085.285	19,96%	24,44%	13,64%
Reksadana	4.906.801	306.262	5,55%	3,59%	6,88%
Property	785.683	75.121	0,89%	0,88%	11,82%
Penyertaan	902.776	130	1,02%	0,00%	0,03%
Total	88.477.814	8.530.598	100,00	100,00	10,25%

J. Business : Jamsostek Incorporated

Bidang Usaha JIC (Investment company (joint venture)), Nayaka (Layanan kesehatan bagi peserta Jamsostek), Bank (Bank Syariah), PJTKI Service Mgt (Bijak), Risk sharing perusahaan asuransi BUMN dan swasta (Reinsurance).

2. PT. Jamsostek (Persero) perlu menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akutabilitas dalam penempatan investasi dengan memberikan manfaat kepada peserta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004, investasi dana dalam deposito, obligasi saham dan reksadana ditentukan oleh direksi sedangkan property dan penyertaan ditentukan oleh pemegang saham.
4. PT. Jamsostek (Persero) diminta untuk klarifikasi mengenai terjadinya kerugian atau penurunan nilai saham (delusi) pada penyertaan dananya (investasi) pada PT. BPI (sekarang Bank Syariah Bukopin).
5. Dalam melakukan investasi hendaknya PT. Jamsostek (Persero) memperhatikan cash ratio yang ada dengan yang diinvestasikan, sehingga dana tetap tersedia bila terjadi klaim besar-besaran dari peserta.
6. Sisa dana dari premi yang terkumpul sesudah dikurangi klaim-klaim peserta setiap tahunnya diusulkan agar tidak semua diinvestasikan, namun hendaknya sebagian digunakan untuk upaya-upaya promotif terhadap keselamatan kerja.
7. PT. Jamsostek (Persero) diminta untuk menjelaskan tentang konsep investasinya di Nayaka dan PT. Bijak yang merupakan anak perusahaan PT. Jamsostek (Persero) yang bergerak dibidang penempatan tenaga kerja di luar negeri.
8. PT. Jamsostek (Persero) hendaknya mengupayakan pemanfaatan dana yang diinvestasikan bagi kesejahteraan peserta, hal ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada PT. Jamsostek (Persero)
9. Dirut PT. Jamsostek telah menyampaikan laporan kepada Pansus Century DPR mengenai kepastian bahwa tidak ada lagi dana PT. Jamsostek yang di simpan di Bank Mutiara eks Bank Century. Sebelum Bank Century di bailout, PT. Jamsostek memang pernah menyimpan dana di Bank Century sebesar Rp 292 Miliar pada tahun 2004 dan direksi PT. Jamsostek saat ini belum menjabat. Penarikan dana terakhir dari simpanan tersebut tercatat tanggal 12 Oktober 2009, sebesar Rp 8,7 Miliar.
10. PT. Jamsostek (Persero) perlu melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan tata laksana kegiatan investasi agar terhindar dari intervensi pihak lain dan lebih mementingkan keamanan dana peserta.

11. PT. Jamsostek (Persero) telah memiliki pedoman pengelolaan investasi sesuai keputusan direksi yang menjadi acuan dalam pengelolaan investasi.
12. PT. Jamsostek (Persero) mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan tenaga kerja dengan mendirikan klinik-klinik plus berdasarkan hasil studi kelayakan di 33 provinsi di Indonesia.
13. Berkaitan dengan program bantuan perumahan bagi peserta Jamsostek, PT. Jamsostek (Persero) saat ini sedang membangun 20 rumah susun dan akan direalisasikan 6 tower yang dapat menampung 400 tenaga kerja dengan tarif Rp 100.000,- per bulan.
14. PT. Jamsostek (Persero) memiliki strategi peningkatan pelayanan hasil investasi peserta jamsostek berupa kerjasama dengan bank melalui layanan ATM sehingga peserta dapat dengan mudah mengakses dana yang dimilikinya.
15. Cara investasi masa lalu dan masa depan sangat berbeda terlihat adanya transformasi pengelolaan dana. Sumber dana ada 2 yaitu dana JHT dan dana Non JHT.
16. PT. Jamsostek (Persero) dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito selain dengan bank-bank Pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui deposito di BPD.
17. Komisi IX DPR RI akan memberikan rekomendasi pada saat Raker dengan Kementerian Kesehatan RI perihal PT. Jamsostek (Persero) perlu mengembangkan Rumah Sakit Rujukan Khusus untuk Pelayanan Kesehatan Kerja di Indonesia.
18. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) lebih mementingkan pemenuhan hak-hak peserta, antara lain meningkatkan promosi, dan pelatihan K3, prevensi dan rehabilitasi penyakit akibat kerja, mendorong kemandirian dan permodalan kepada peserta, pelatihan sebelum pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri dan pemenuhan claim yang diajukan peserta Jamsostek.
19. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk menyampaikan laporan secara tertulis perihal terjadinya kerugian atau delusi saham akibat dari penyertaan dana jamsostek pada Bank Syariah Bukopin (dahulu PT.BPI) dan dana-dana deposito di Bank-bank Pemerintah, BPD dan Bank-bank Swasta, serta pembagian dana hasil investasi kepada peserta. Laporan tersebut diserahkan kepada Sekretariat Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya pada hari Senin, 15 Pebruari 2010, sebelum pukul 12.00 WIB.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penempatan investasi, untuk sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 yang menitikberatkan manfaat nyata kepada peserta.
2. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) agar menyempurnakan pedoman kerja dan tata laksana kegiatan investasi agar menghindarkan diri dari intervensi pihak lain, tetapi lebih mementingkan pertimbangan untuk keamanan dana peserta.
3. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) lebih mementingkan pemenuhan hak-hak peserta, antara lain meningkatkan promosi, dan pelatihan K3, prevensi dan rehabilitasi penyakit akibat kerja, mendorong kemandirian dan permodalan kepada peserta, pelatihan sebelum pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri dan pemenuhan claim yang diajukan peserta Jamsostek.
4. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk menyampaikan laporan secara tertulis perihal terjadinya kerugian atau delusi saham akibat dari penyertaan dana jamsostek pada Bank Syariah Bukopin (dahulu PT.BPI) dan dana-dana deposito di Bank-bank Pemerintah, BPD dan Bank-bank Swasta, serta pembagian dana hasil investasi kepada peserta. Laporan tersebut diserahkan kepada Sekretariat Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya pada hari Senin, 15 Februari 2010, sebelum pukul 12.00 WIB.

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB

Jakarta, 11 Pebruari 2010
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



Dr. SUMARJATI ARYOSO, SKM